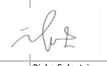


REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN DIPRL BULAN JUNI 2026

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT											
UNIT KERJA : Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Peraliran dan Dasar Laut											
PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2026											
No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Nama Pelapor	Penanganan		Tindaklanjut		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	Hotline PTSA PRL	6/1/2026 cuti hari lahir pancasila	Permintaan informasi			Admin Hotline	PIC Dokumen		Selesai	
2	-	Hotline PTSA PRL	02/06/2026	Permintaan informasi	Selamat pagi kami ada mengajukan penambahan KBLI pada KKPRL pada tgl 28 April 2026, mohon infonya, apakah pengajuan kami sdh dapat disetujui, mengingat KKPRL kami akan berakhir pada 10 Juli 2026.	Hendi PT Sarana Industama Perkasa	Admin Hotline	PIC Dokumen		Selesai	
3	-	Hotline PTSA PRL	03/06/2026	Permintaan informasi	Bu saya mau bertanya untuk kegiatan permohonan pkppl BUMN tetap via esea atau oss?	Ahmad DPUTR Kab. Kep Selayar	Admin Hotline	PIC Dokumen		Selesai	
4	-	Hotline PTSA PRL	04/06/2026	Permintaan informasi	Assaalamualaikum Selamat pagi Hotline Perijinan KKP, Berikut saya/kami PT. Jaya Pasir Andalan dari Mamuju, Sulawesi Barat (Djunaldi Mertosono) melampirkan data permohonan KKPRL yang sampai saat ini belum ada hasil verifikasiya... berdasarka data OSS RBA dan e-SEA Tracking	Bang Jun PT Jaya Pasir Andalan	Admin Hotline	PIC Dokumen		Selesai	
5	-	Hotline PTSA PRL	05/06/2026	Permintaan informasi	Kami pertanyakan kenapa tidak ada tindak lanjut verifikasi, kenapa di tolak tampak ada penjelasannya..	PT Jaya Pasir Andalan	Admin Hotline	PIC Dokumen		Selesai	
6	-	Hotline PTSA PRL	09/05/2026	Permintaan informasi			Admin Hotline	Admin Hotline		Selesai	
7	-	Hotline PTSA PRL	06/06/2026	Permintaan informasi	-	-	Admin Hotline	Admin Hotline	-	Selesai	-
8	-	Hotline PTSA PRL	07/06/2026	Permintaan informasi	-	-	Admin Hotline	Admin Hotline	-	Selesai	-
9	-	Hotline PTSA PRL	08/06/2026	Permintaan konfirmasi	Izin bertanya kembali apakah boleh dibantu untuk tata cara menambahkan/mengganti KBLI untuk yang sudah memiliki kkppl sebelumnya? Terimakasih	Langkah-2 untuk penambahan KBLI - buat permohonan baru di OSS - lampirkan dokumen permohonan yg sebelumnya terbit - pada dokumen rencana instalasi bangunan, bagian sub bab tujuan, ditambahkan narasi bahwa permohonan merupakan penambahan KBLI - pada dokumen perizinan lainnya dilampirkan izin yg sudah dimiliki sebelumnya, beserta dokumen PKKPRL yang sudah terbit sebelumnya (yg akan ditambahkan KBLI) - submit permohonan	Admin Hotline	Admin Hotline		Selesai	

10		Hotline PTSA PRL	09/06/2026	Permintaan konfirmasi	Izin bertanya apakah pada saat pemrakarsa bayar pnpb tidak notif keterangan sudah bayar?	PT Energi Unggul Persada	Admin Hotline	Admin Hotline	tidak ada, setelah bayar pnpb dan upload bukti bayar di oss pada akun pemrakarsa statusnya adalah sudah verifikasi pembayaran dan jika sudah terbit maka statusnya adalah sudah terbit izin, demikian	Selesai	
11		Hotline PTSA PRL	10/06/2026	Permintaan informasi	Selamat Pagi.. jika ingin bersurat mohon asistensi untuk perbaikan pengajuan permohonan PKKPRL izin rumpun ke Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, apakah perlu dikirim ke PTSP pusat..? Mohon arahan..	PT Bandar Nelayan	Admin Hotline	Admin Hotline	selamat pagi bapak/ibu, terkait hal tersebut saudara dapat mengirimkan surat kepada KKP. Jelaskan maksud dan tujuan surat, cantumkan nomor WA yang aktif, email yang aktif dan melampirkan juga file shp titik koordinat lokasi yang akan dimohonkan KKPRL dimasukkan kedalam folder googledrive open akses. surat dikirimkan kepada : Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, Ditjen Penataan Ruang Laut KKP. Perihal : Permohonan Asistensi KKPRL PT.... alamat email kami : perizinan.pr@gmail.com dan dikirim juga ke nomor hotline ini. terimakasih.	Selesai	
12		Hotline PTSA PRL	11/06/2026	Permintaan informasi	Izin bertanya untuk permohonan PKKPRL setelah satmid sampai dapat undangan penilaian teknis berapa lama ?	Candra, Asan	Admin Hotline	Admin Hotline	Selamat pagi, hal tersebut tergantung kepadatan antrian verifikasi dokumen oleh tim teknis	Selesai	
13		Hotline PTSA PRL	12/06/2026	Permintaan informasi	Izin melakukan konfirmasi terkait perizinan pengambilan dan pemanfaatan air laut untuk kegiatan pengolahan garam serta kegiatan pengolahan air laut untuk berbagai keperluan non-energi, termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan air bersih, air baku, dengan KBLU 36001 dan 36002 Mohon informasi terkait hal-hal sebagai berikut: 1. Instansi dan/atau pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan pengambilan dan pemanfaatan air laut untuk kegiatan tersebut. * Menteri, kementerian, atau instansi manakah yang berwenang menerbitkan perizinan dimaksud? * Apakah kewenangan perizinan dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat pemerintahan (kabupaten/kota, provinsi, atau pemerintah pusat), atau merupakan kewenangan pemerintah pusat secara langsung? * Apabila kewenangannya berbeda berdasarkan kapasitas, lokasi, atau karakteristik kegiatan usaha, mohon penjelasan mengenai pembagian kewenangan tersebut.	Amelda (law)	Admin Hotline	Admin Hotline	Selamat siang untuk Alse silahkan menghubungi Dit. SDK ya	Selesai	
14		Hotline PTSA PRL	13/06/2026	Permintaan informasi			Admin Hotline	Admin Hotline		Selesai	
15		Hotline PTSA PRL	14/06/2026	Permintaan informasi			Admin Hotline	Admin Hotline		Selesai	
16		Hotline PTSA PRL	15/06/2026	Permintaan informasi	Selamat siang, untuk pengajuan berikut gimana progresnya ya bapak / ibu ? Ini posisi sejak 11 Mei 2026 Belum ada pergerakan bapak / ibu ? Mohon dibantu	Luky Heryanto	Admin Hotline	admin Hotline	Untuk permohonan a.n. Luky Heryanto sudah disetujui menteri, namun terdapat kendala pada saat notifikasi penerbitan lewat OSS karena ada bug pada system OSS. Sedang diperbaiki oleh BKPM.	Selesai	
17		Hotline PTSA PRL	6/16/2026 cuti tahun baru islam	cuti tahun baru islam	cuti tahun baru islam	cuti tahun baru islam	Admin Hotline	Admin Hotline	cuti tahun baru islam	Selesai	
18		Hotline PTSA PRL	17/06/2026	Permintaan informasi	Pagi pak/ibu, izin mau tanya untuk kegiatan pemerintah pengajuan PKKPRL nya apa tetap melalui oss?	Devi BBWS Mesuji Sekampung Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR	Admin Hotline	Admin Hotline	selamat pagi ibu, untuk pengajuan KKPRL kegiatan pemerintah bisa lewat https://e-spa.kkp.go.id	Selesai	
19		Hotline PTSA PRL	18/06/2026	Permintaan informasi	Selamat Siang, saya Andini dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. izin menanyakan perihal catatan dari Tim Admin Verifikasi Dokumen KKRL Pelabuhan Bawean sbb: 1. Mengenai poin 1 sampai 3. Kami telah melakukan input dokumen seperti deskripsi dasar kegiatan, deskripsi kegiatan eksisting yang dimohonkan, apakah kami perlu merubah tatanan susunan dokumen sesuai dengan poin 1 atau bagaimana? 2. Perihal peta arus yang dimaksud bagaimana? Apakah bisa dibuktikan dengan peta current rose? Terima kasih.	Andini Kurniawati Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur	Admin Hotline	Admin Hotline	selamat siang bapak/ibu, terkait hal tersebut saudara dapat mengirimkan surat kepada KKP. Jelaskan maksud dan tujuan surat, cantumkan nomor WA yang aktif, email yang aktif dan melampirkan juga file shp titik koordinat lokasi yang akan dimohonkan KKPRL dimasukkan kedalam folder googledrive open akses. surat dikirimkan kepada : Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, Ditjen Penataan Ruang Laut KKP. Perihal : Permohonan Asistensi KKPRL a.nalamat email kami : perizinan.pr@gmail.com dan dikirim juga ke nomor hotline ini. terimakasih.	Selesai	
20		Hotline PTSA PRL	19/06/2026	Permintaan informasi	Selamat pagi pak/ibu, saya Delfi dari PT Majesty Sarana Energy, mohon bantuannya untuk dapat menginfokan progres pengajuan PKKPRL kami dengan NKU 202606-0808-4134-5131-827 terkait penambahan KBLU.	Delfi PT Mitra Andalan	Admin Hotline	Admin Hotline	Mohon menunggu antrian verifikasi dokumen, terima kasih.	Selesai	
21		Hotline PTSA PRL	20/06/2026	Permintaan informasi			Admin Hotline	Admin Hotline		Selesai	
22		Hotline PTSA PRL	21/06/2026	Permintaan informasi			Admin Hotline	PIC Dokumen		Selesai	
23		Hotline PTSA PRL	22/06/2026	Permintaan informasi	Assalamualaikum Yth. Bpk/ibu, mau tanya apakah benar bagi perusahaan yg blm mendapatkan Persetujuan Rencana Lokasi Prioritas (PRLP) dan Sudah dpt PRLP tp blm membayar PKKPRL pasir sedimentasi, harus mengajukan permohonan ijin ulang. Tks Salam	Yayat PT Millenial Besar Bersama - PT Riau Mulla Jaya	Admin Hotline	PIC Dokumen	wa'alaiakumslam setiap kegiatan yang menggunakan ruang laut secara menetap dan terus menerus lebih dari 30 hari wajib memiliki izin pemanfaatan ruang laut / KKPRL	Selesai	
24		Hotline PTSA PRL	23/06/2026	Permintaan informasi	selamat pagi, mau bertanya mengenai, permohonan PKKPRL yang di ajukan via oss. jdi ketika saya bermohon , kblu yng mau saya ajukan 52221, tidak muncul sama sekali	Erik Prawiro PT Kuarsa Anugerah Singkep, PT Pasir Singkep Barat	Admin Hotline	PIC Dokumen	selamat pagi bapak, izin terkait tampilan oss anda dapat menanyakan hal tersebut pihak BKPM, terimakasih	Selesai	

25		Hotline PTSA PRL	24/06/2026	Permintaan informasi	Selamat siang Bapak/Ibu Waktu tunggu untuk verifikasi PKKPRL setelah pengajuan di OSS saat ini berapa bulan ya? Apakah sudah lebih cepat? Terimakasih	Mas Sandhi PT. Neptune Aquatic Marine	Admin Hotline	PIC Dokumen	selamat siang, kami proses permohonan KKPRL sesuai antrian, jika dokumen permohonan sudah sesuai semua proses dapat dilakukan dengan cepat. terimakasih.	Selesai	
26		Hotline PTSA PRL	25/06/2026	Permintaan informasi	Selamat pagi..izin bertanya..kami telah submit di app E-sea laporan tahunan unik 2 kkpri dengan nomor: 1. 01102410513300095 2. 02102410513300032 Pada tanggal 22 Juni 2026, namun sampai dengan saat ini, kami belum menerima tanda terima nya, mohon kiranya dibantu	Johan PT PLN JATENG	Admin Hotline	PIC Dokumen	Terima kasih atas pertanyaannya, terkait Laporan Tahunan anda dapat menghubungi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Selesai	
27		Hotline PTSA PRL	26/06/2026	Permintaan informasi	Ijin mau nanya kalau di sistem ada persyaratan lain, surat permohonan 0 rupiah maksudnya gimana ijin	Supri Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah Dishub DKI Jakarta	Admin Hotline	PIC Dokumen	Terkait hal tersebut, untuk kegiatan nonberusaha yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBN/APBD, tidak dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Selesai	
28		Hotline PTSA PRL	27/06/2026	Permintaan informasi	-	-	Admin Hotline	PIC Dokumen	-	Selesai	
29		Hotline PTSA PRL	28/06/2026	Permintaan informasi	-	-	Admin Hotline	PIC Dokumen	-	Selesai	
30		Hotline PTSA PRL	29/06/2026	Permintaan informasi	Ada pertanyaan terkait reklamasi, berikut ini pertanyaan dari saya 1. Siapa yang menerbitkan izin Reklamasi di area Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi sebuah kota yang tidak ada keterangan Nasional/Provinsi/Kotanya? Menteri atau Gubernur? 2. Terkait dokumen teknis seperti Rencana Induk Reklamasi, Studi Kelayakan, dan Rancangan Detail Reklamasi apakah bisa diisi/dibuat oleh Konsultan? 3. Apabila semua dokumen sudah siap, bagaimana proses permohonannya? 4. Apabila permohonan ditolak apakah bisa mengajukan permohonan ulang?	Dimas	Admin Hotline	PIC Dokumen	Terkait pertanyaan nomor 1 dan 2, Bapak/Ibu dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan melalui kontak berikut. Terkait pertanyaan nomor 3, mohon konfirmasi apakah Bapak/Ibu bermaksud mengajukan permohonan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut? Dan untuk nomor 4, permohonan dapat diajukan kembali dengan terlebih dahulu memenuhi catatan atau persyaratan sebagaimana tercantum dalam hasil penolakan sebelumnya	Selesai	
Ketua TPP										Jakarta, 30 Juni 2026	
										Admin Pengaduan	
Rizka Sulastri											
										Nasrulloh	Elra Raiqah Prihartono

UNIT KERJA : BPRL MAKASSAR PERIODE BULAN JUNI 2026											
No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjuti		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.45262E+13	Langsung	05/06/2026	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Paramesti Maju Karya atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan kegiatan Keramba Jaring Apung di Minihasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara	PT Paramesti Maju Karya	Muhammad Fadly	Andi Jaya	1. Pemohon akan melakukan kegiatan budidaya menggunakan keramba jaring apung untuk kegiatan pembesaran lobster di Kec. Likapung Barat, Kab. Minahasa Utara 2. Pemohon perlu melakukan plotting titik koordinat dengan memperhatikan hussan area laut yang akan digunakan 3. Pemohon perlu memperhatikan pemilihan lokasi penempatan keramba jaring apung karena dekat dengan area pelabuhan agar tidak mengganggu alur pelayaran 4. Pemohon perlu melakukan pemenuhan data-data yang dibutuhkan dalam proposal permohonan KKPRL 5. Pemohon perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan 6. Pemohon disarankan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/18XlWwSG2wwSEVzn4H4nNcy4ANgdZo709j?usp=drive_link
	4.45262E+13	Langsung	05/06/2026	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Paramesti Maju Karya atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan kegiatan Reklamasi di Manado, Provinsi Sulawesi Utara	PT Paramesti Maju Karya	Muhammad Fadly	Andi Jaya	1. Pemohon akan melakukan kegiatan reklamasi di Kcc. Sario Utara, Kota Manado 2. Pemohon perlu melakukan plotting titik koordinat dengan memperhatikan hussan area laut yang rencananya akan digunakan 3. Pemohon perlu melakukan pemenuhan data-data yang dibutuhkan dalam proposal permohonan KKPRL 4. Pemohon disarankan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan 5. Pemohon perlu berkoordinasi dengan tetangga yang telah melakukan kegiatan reklamasi/pemanfaatan ruang laut lainnya di sekitar lokasi yang akan dimohonkan 6. Pemohon perlu memperhatikan akses dan keberlangsungan tambatan perahu dari nelayan yang ada di lokasi yang akan dimohonkan 7. Pemohon perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/18XlWwSG2wwSEVzn4H4nNcy4ANgdZo709j?usp=drive_link

	4,45262E+13	Online	06/10/2026	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Rekind Daya Mamuju atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan kegiatan Terminal Khusus di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	PT Rekind Daya Mamuju	Muhammad Fadly	Andi Jaya	1. Kegiatan utama yang dimohonkan adalah Terminal Khusus untuk loading batu bara, kegiatan ini mendukung kegiatan utama berupa PLTU. Kegiatan yang dilakukan di ruang laut berupa jetty dan ALSE untuk pendingin turbin; 2. Pemohon perlu menambahkan penjelasan informasi mengenai uraian latar belakang, tujuan, dan manfaat kegiatan usaha yang mencakup kegiatan operasional demaga dan jetty serta pemanfaatan air laut selain energi (ALSE); 3. Pemohon perlu menambahkan penjelasan informasi mengenai detail kegiatan eksisting yang dilakukan; 4. Pemohon perlu menambahkan penjelasan informasi mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan dalam bentuk tabular yang dilengkapi dengan informasi mengenai timeline kegiatan, dimulai dari kegiatan pembangunan hingga operasional; 5. Pemohon perlu melakukan kalkulasi / penghitungan ulang terhadap luas area yang dimohonkan, yang meliputi seluruh area pemanfaatan eksisting dan rencana pengembangan ke depan; 6. Pemohon perlu menambahkan penjelasan informasi mengenai detail site plan masing-masing kegiatan 7. Pemohon perlu menambahkan penjelasan informasi mengenai jumlah dan spesifikasi tongkang yang beroperasi di area PT Rekind Daya Mamuju. 8. Pemohon perlu menambahkan penjelasan informasi mengenai pemanfaatan ruang laut yang ada di sekitar lokasi permohonan, baik di sebelah timur, utara, selatan, dan barat. Informasi tersebut perlu dilengkapi dengan dokumentasi dan informasi mengenai jarak pemanfaatan ruang lain terhadap permohonan yang diajukan.	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1OTWSMsi3e2XcYXPIeNQzPv7JZ0858n7usg=drive-link
	4,45262E+13	Langsung	11/06/2026	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Vayam Boutique Resort (PT Matahari Luxury Villas) atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan kegiatan Konstruksi Pelindung Pantai di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Vayam Boutique Resort (PT Matahari Luxury Villas)	Muhammad Fadly	Andi Jaya	1. Terdapat talut untuk mengatasi abrasi, dan dari PT ingin mengajukan KKPRL 2. pengecekan lokasi Vayam apakah masuk wewenang darat atau laut melalui acuan garis pantai 3. Konsultasi proses pengajuan KKPRL 4. Pemberitahuan adanya konflik ruang laut disekitar Villa Vayam, terutama di Gili Asahan 5. Penjelasan KKPRL yang sudah terbit di sekitar Vayam melalui e-sea map 6. Permintaan arahan cara pengajuan KKPRL mooring bouy milik vaya, seperti dokumen yang harus dipenuhi 7. Pemberian penjelasan informasi rincian yang perlu dibahas pada dokumen pengajuan KKPRL khususnya data ekosistem pesisir	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1UjMa6QvWZPLNFYg_uDQl3QdUyV2Jusg=drive-link
	:44526181520010	Langsung	11/06/2026	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), di Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat	PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT)	Muhammad Fadly	Andi Jaya	1. Dimaklumkan permohonan mengenai kerja sama antara PT Amman Mineral dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terkait pengelolaan pelabuhan, khususnya Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), termasuk kajian terhadap dasar hukum dan regulasi yang menjadi landasan kerja sama tersebut. 2. Dibahas tindak lanjut atas temuan Inspektorat pada tahun 2019 yang berkaitan dengan aspek perizinan, dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta mencegah terulangnya temuan serupa pada masa mendatang. 3. Perwakilan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) memberikan penjelasan terkait kewenangan dan aspek pengawasan terhadap kegiatan operasional pelabuhan yang menjadi objek pembahasan. 4. Disampaikan bahwa izin operasional TUKS telah diterbitkan sejak tahun 2001, namun pemanfaatan dan operasionalisasi fasilitas tersebut baru mulai dilaksanakan pada tahun 2012. 5. PT Amman Mineral melakukan konsultasi terkait langkah-langkah penyelesaian permasalahan perizinan guna memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan serta menghindari potensi temuan dari instansi pengawas. Salah satu fokus pembahasan adalah aspek perizinan pemanfaatan ruang laut. 6. Disampaikan penjelasan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan perizinan, antara lain PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemetaan Ruang Laut. Pembahasan juga mencakup kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penerbitan perizinan pemanfaatan ruang	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1UjYyZT94R8JoWpGrgTgD3PDjKAc3CG?usp=drive-link
	4,45262E+13	Langsung	15/06/2026	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Prapat Agung Permai atas rencana permohonan Persetujuan untuk permohonan kegiatan Gardu Pandang di Buleleng Provinsi Bali	PT Prapat Agung Permai	Muhammad Fadly	Andi Jaya	1. Pemohon menanyakan tindak lanjut dari surat Dirjen Penataan Ruang Laut perihal Surat Peringatan Pertama Pengurusan KKPRL 2. Pemohon ingin mengetahui prosedur dan proses pengajuan KKPRL dengan kegiatan yang diindikasikan memanfaatkan ruang laut yaitu Gardu Pandang untuk Hotel Menjangan Dyraasti 3. Pemohon berkonsultasi terkait point-point yang perlu disampaikan pada dokumen permohonan seperti timeline pembangunan, site plan bangunan beserta 4 titik koordinat, informasi pemanfaatan sekitar dan detail kegiatan yang diusulkan 4. Pemohon perlu melampirkan dokumentasi kegiatan yang sudah eksisting, dokumentasi terkait pemanfaatan ruang laut sekitar, ekosistem dan hidro oseanografi 5. Pemohon diarahkan untuk melakukan koordinasi dengan Taman Nasional Bali Barat karena pada lokasi yang dimohonkan masuk pada zona konservasi Taman Nasional Bali Barat	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1mgfsl0AHbCLCU2eaWxO4cQn0XZyngTC?usp=drive-link

4.45262E+13	Online	15/06/2026	Permohonan Informasi	Permohonan Infomasi dan konsultasi Dinas Perikanan Kabupaten Barru atas rencana permohonan Konfirmasi untuk permohonan kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih, Konservasi Penyud dan Rumpun di Barru Provinsi Sulawesi Selatan	Dinas Perikanan Kabupaten Barru	Muhammad Fadly	Andi Jaya	Konsultasi mengenai alokasi ruang laut untuk Dinas Perikanan Kabupaten Barru, dengan fokus pada lokasi rencana pengusulan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di daerah Siddo dan Takkalasi, penggunaan ruang laut untuk kebutuhan area konservasi penyud, serta izin pemasangan rumpun di perairan Selat Makassar. 1. KNMP TAKKALASI Pada tanggal 21 April 2026, telah dilaksanakan konsultasi atas permohonan Dinas Perikanan Kabupaten Barru terkait kebutuhan alokasi ruang laut untuk lokasi pengusulan KNMP tahun 2026. Lokasi yang dipilih awalnya berada di Kecamatan Takkalasi dan Kecamatan Kupa, dan telah diberikan arahan mengenai rekomendasi ruang laut yang dapat digunakan. Pada tanggal 15 Juni 2026, Dinas Perikanan Kabupaten Barru kembali mengajukan permohonan konsultasi alokasi ruang laut untuk lokasi pengusulan KNMP tahun 2026 yang difokuskan pada Kelurahan Takkalasi dan Desa Siddo. Terdapat perubahan lokasi rencana KNMP di Kelurahan Takkalasi. Lokasi yang awalnya berada di sisi utara dermaga PPI Takkalasi digeser ke sisi selatan dermaga dikarenakan lokasi awal merupakan area yang digunakan oleh nelayan setempat untuk menjemur atau mengeringkan ikan. Berdasarkan hasil analisis spasial menggunakan citra satelit, rencana lokasi terbaru untuk KNMP Takkalasi tumpang tindih (overlap) dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPR).	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1c5AWaHBSfNRagvP3yJsg-t-Vs2i60d?usp=drive_link
4.45263E+13	Langsung	18/06/2026	Permohonan Informasi	Permohonan Infomasi dan konsultasi CV Mutia Marina Sejahtera atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Instalasi Perikanan di Takalar Provinsi Sulawesi Selatan	CV Mutia Marina Sejahtera	Muhammad Fadly	Andi Jaya	1. Perusahaan CV. Mutia Marina Sejahtera telah memiliki izin lokasi perikanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dan akan segera berakhir masa berlakunya. 2. CV. Mutia Marina Sejahtera memiliki usaha yang bergerak dibidang tambak udang Vaname yang berada di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar berdasarkan RTRWP Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 lokasi yang dimohonkan berada pada zona perikanan tangkap yang dimana kegiatan usaha tersebut diperbolehkan dengan syarat. 3. Tim teknis PKKPR BPRL Makassar telah menjelaskan terkait dengan kewajiban pengurusan KKPRL dan prosedur pengurusanannya termasuk dengan persyaratan yang harus dipersiapkan. 4. Tim teknis menyampaikan kepada pihak CV Mutia Marina Sejahtera untuk melampirkan dokumen perizinan yang telah dimiliki sebelumnya seperti bukti kepemilikan lahan darat, izin lokasi, data investasi dan tenaga kerja 5. Tim Teknis juga menyarankan untuk dilakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan melampirkan dokumentasi, daftar hadir dan Berita Acara keterlibatan dari masyarakat terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan 6. Pihak dari CV. Mutia Marina Sejahtera akan kembali berkoordinasi dengan internal perusahaan terkait dengan pengurusan izin KKPRL tersebut.	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/file/d/1vSj2JPgRRxYAx11RAHuRQ5Ig-c_bpyf4/view?usp=drive_link
4.45263E+13	Langsung	22/06/2026	Permohonan Informasi	Permohonan Infomasi dan konsultasi CV. Lautan Ikan Nusantara atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Instalasi Perikanan di Buton Provinsi Sulawesi Tenggara	CV. Lautan Ikan Nusantara	Muhammad Fadly	Andi Jaya	1. Pemohon perlu untuk menyusun dokumen sesuai dengan format Permohonan PKKPR yang telah diberikan. 2. Pemohon perlu untuk berkoordinasi ke Dinas DKP Provinsi Sulawesi Tenggara terkait permohonan yang berada di Zona Pariwisata	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1flgP3X89_dU8n2GFtNqp8JXd9ppZwss9?usp=drive_link
4.45263E+13	Online	23/06/2026	Permohonan Informasi	Permohonan Infomasi dan konsultasi PT. Yongning Internasional Investasi atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Pemanfaatan air laut untuk budidaya di Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	PT. Yongning Internasional Investasi	Muhammad Fadly	Andi Jaya	• Berdasarkan pada dokumen site plan yang diajukan oleh pemohon (PT Yongning Internasional Investasi), telah terdapat gambar instalasi, namun belum disertai narasi teknis yang menjelaskan spesifikasi detail instalasi pengambilan air laut serta informasi teknis perpipaan yang masih belum dicantumkan secara rinci. Sehubungan dengan hal tersebut, BPRL Makassar meminta kepada Pemohon untuk melengkapi data teknis berupa panjang pipa pengambilan air laut, diameter pipa, titik intake air laut, jalur perpipaan menuju tambak, kapasitas pengambilan air, deskripsi bangunan penunjang, serta diagram alir sistem pemanfaatan air laut agar aspek teknis dan operasional kegiatan dapat tergambarkan secara lengkap dan jelas. • Pemohon menjelaskan bahwa air limbah kegiatan budidaya tidak dibuang langsung ke laut karena telah menggunakan sistem IPAL internal, di mana limbah dialirkan terlebih dahulu ke kolam pengendapan pertama, kemudian dilanjutkan ke kolam pengendapan kedua untuk proses bertahap sebelum sebagian air meresap secara alami di area pengelolaan, serta endapan organik dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, sehingga tidak terdapat saluran pembuangan langsung menuju laut. Menanggapi hal tersebut, BPRL meminta agar seluruh mekanisme pengelolaan limbah tersebut dituangkan secara rinci dalam dokumen permohonan, termasuk diagram alur limbah, kapasitas kolam pengendapan, mekanisme pengolahan limbah, lokasi IPAL, metode pengendalian pencemaran, serta neraca air masuk dan keluar agar dapat dilakukan evaluasi teknis secara menyeluruh. • Berdasarkan penjelasan Pemohon, sistem pemanfaatan air laut yang direncanakan meliputi pengambilan air laut dari area pantai milik perusahaan, kemudian dialirkan melalui jaringan pipa menuju tandon sebagai tempat penyimpanan sementara, sebelum akhirnya didistribusikan dari tandon ke kolam-kolam budidaya udang. Terhadap rencana tersebut, BPRL meminta agar proses sistem tersebut dijelaskan secara lebih rinci dalam dokumen permohonan, terutama terkait alur pengambilan air, volume air yang diambil, kapasitas tandon,	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/17-PknUeQ9gKDbuUJPPX0uYLRUzq2wp?usp=drive_link

	4,45263E+13	Langsung	25/06/2026	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Weiming Nusantara Bali atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Denpasar Provinsi Bali	PT Weiming Nusantara Bali	Muhammad Fadly	Andi Jaya	1. Kegiatan yang dimohonkan adalah instalasi pipa Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang digunakan sebagai pendingin turbin pembangkit listrik yang bersumber dari pengolahan sampah; 2. Lokasi yang dimohonkan berada di Kelurahan Serangan, Denpasar Selatan; 3. Pemrakarsa perlu memiliki bukti kerjasama pengusahaan lahan darat dengan pemerintah setempat; 4. Pemrakarsa harus berbentuk badan usaha (PT/CV) dengan melengkapi seluruh legalitas untuk melakukan kegiatan berusaha di Indonesia; 5. Pemrakarsa harus memiliki perjanjian/MOU yang jelas dengan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (BUPP PSEL) selaku inisiator kegiatan; 6. Apabila kegiatan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemrakarsa harus memiliki surat keterangan dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau Peraturan Presiden yang menyatakan bahwa kegiatan masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional;	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1WxdK7oR50Kb3zMrq7NlEibpcsvrLk8p?usp=drive_link
	4,45263E+13	Langsung	25/06/2026	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Dermaga/Jetty di Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah	Muhammad Fadly	Andi Jaya	Menindaklanjuti hasil dari undangan rapat dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB pada Selasa, 23 Juni 2026 di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, pemrakarsa melakukan konsultasi terkait: 1. Permohonan terkait Dermaga/Jetty (sudah existing) yang sebelumnya sudah melakukan proses ijin Persetujuan KKPRIL dengan subjek hukum PT Selancar Kinen (memiliki MOU dengan Dinas Perhubungan Lombok Tengah) dengan nomor permohonan OSS I-202601130805149859089 namun hasil penilaian teknis ditolak karena : a. Pemrakarsa belum memperoleh surat persetujuan dari Dinas Pariwisata selaku pengelola area di depan Lokasi; b. Pemrakarsa belum memperoleh surat persetujuan kegiatan dan tidak keberatan dari PT Telekomunikasi Indonesia; c. Pemrakarsa belum memperoleh surat persetujuan dari pemilik lahan di sekitar Lokasi permohonan. 2. Pada point a dan c sudah didapatkan oleh pemrakarsa, namun untuk point b dari PT Telekomunikasi Indonesia tidak bersedia memberikan surat rekomendasi tidak keberatan dengan alasan: a. Referensi jarak aman untuk kabel laut dengan aktivitas yang ada dilaut yaitu minimal 500m; b. Selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2025 Telkom mengalami gangguan kabel laut yang disebabkan oleh aktivitas kapal sebesar 76%; c. Sangat tingginya biaya preventif dan maintenance kabel laut Telkom sehingga penangan kabel laut menjadi saat penting dan krusial bagi Telkom untuk menjaga keandalan layanan pelanggan PT Telkom; 3. Kondisi saat ini jarak dermaga dengan kabel PT Telekomunikasi kurang lebih 50m; 4. Pemrakarsa berencana akan berpindah proses pengajuan ijin dari sebelumnya persetujuan KKPRIL oleh PT Selancar Kinen menjadi proses Konfirmasi oleh Dinas Perhubungan Lombok Tengah; 5. Petugas menjelaskan terkait proses pengajuan ijin Konfirmasi	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1uIdx233N46TzIzZpOh02jX0g0loeMw?usp=drive_link
	4,45263E+13	Langsung	29/06/2026	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Teluk Rarandam Bersama atas rencana permohonan persetujuan untuk permohonan kegiatan Dermaga di Bitung Provinsi Sulawesi Utara	PT Teluk Rarandam Bersama	Muhammad Fadly	Andi Jaya	1. Pemohon membangun dermaga di Pintakota, Kec. Lembeh Utara, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara 2. Pemohon perlu melakukan pemenuhan data-data yang dibutuhkan dalam proposal permohonan KKPRIL 3. Pemohon perlu melakukan plotting titik koordinat berhimpitan dengan garis pantai dan sesuai dengan kepemilikan lahan darat yang telah dimiliki 4. Pemohon perlu mencantumkan titik koordinat dan foto geotag pada saat melakukan pengambilan data ekosistem 5. Pemohon perlu melampirkan dokumen sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait rencana pembangunan yang telah akan dilakukan 6. Pemohon perlu melampirkan dokumen kepemilikan lahan darat yang dimiliki oleh perusahaan dan izin lain yang dimiliki 7. Pemohon perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan PSDKP Bitung terkait sanksi pemanfaatan ruang laut yang telah disampaikan oleh PSDKP Bitung	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1lpuz2NDV_f77iXzkG6pxSmT4GbV1sn1pS?usp=drive_link
	4,45263E+13	Langsung	29/06/2026	Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Fasharkan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan) Bitung atas rencana permohonan konfirmasi untuk permohonan kegiatan Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan di Bitung Provinsi Sulawesi Utara	Fasharkan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan) Bitung	Muhammad Fadly	Andi Jaya	Pemohon membangun Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan di Aertembaga Dua, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Pemohon perlu melakukan pemenuhan data-data yang dibutuhkan dalam proposal permohonan KKPRIL Pemohon perlu melakukan plotting titik koordinat berhimpitan dengan garis pantai dan sesuai dengan kepemilikan lahan darat yang telah dimiliki Pemohon perlu mencantumkan titik koordinat dan foto geotag pada saat melakukan pengambilan data ekosistem Pemohon perlu melampirkan dokumen kepemilikan lahan darat yang dimiliki oleh perusahaan dan izin lain yang dimiliki Pemohon perlu melampirkan bukti penggunaan APBN dalam pembangunan Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan milik TNI AL	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1CK7skQ7x8mYIF7K2BD8kHl_09bnygE?usp=drive_link

				Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Koperasi Desa Merah Putih Nisombalia atas rencana permohonan konfirmasi untuk permohonan kegiatan Fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih		Muhammad Fadly	Andi Jaya	Koperasi Desa Nisombalia bermaksud mengajukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Nisombalia, Kecamatan Marau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Nisombalia merupakan salah satu lokasi yang telah ditetapkan sebagai calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Calon Lokasi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahap II Tahun 2025. Dalam permohonan tersebut, kegiatan pemanfaatan ruang laut yang diajukan berupa pembangunan dermaga/tambatan perahu sebagai bangunan menetap yang berfungsi untuk menunjang aktivitas Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan darat, khususnya dalam mendukung kegiatan perikanan, mobilitas nelayan, serta distribusi hasil perikanan. Adapun poin-poin hasil konsultasi awal adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan utama yang akan dikembangkan dalam kawasan Kampung Nelayan Merah Putih berpusat pada operasional Koperasi Desa dengan fokus pada sektor perikanan. Dalam rangka mendukung aktivitas tersebut, diperlukan infrastruktur tambahan perahu yang berfungsi sebagai sarana sandar kapal nelayan, kegiatan bongkar muat hasil perikanan, serta menunjang operasional perikanan secara keseluruhan. 2. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Koperasi Desa, pembangunan fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih saat ini masih berada pada tahap konstruksi. Subhubungan dengan hal tersebut, pengurusan perizinan, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), direncanakan dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan pembangunan agar proses administrasi dan	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1XlIP13fUg94UyG8OKgtOaQ0FtrNkeCy2?usp=drive_link
4,4526E+13	Langsung	29/06/2026		Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi Desa Adat Pedungan atas rencana permohonan koefirmasi untuk permohonan kegiatan Ritual Keagamaan dan Aktivitas Kenelayanan di Denpasar Provinsi Bali	Koperasi Desa Merah Putih Nisombalia	Muhammad Fadly	Andi Jaya	1. Terdapat 2 kelompok nelayan yang penangkalanannya mengalami sedimentasi lumpur dikarenakan reklamasi pelabuhan benas 2. Pada saat upacara kegiatan keagamaan melarung ahu juga tidak bisa dikarenakan sedimentasi lumpur 3. manager TJSL Pelindo telah dilakukan koordinasi dan komunikasi oleh desa adat yang menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari tanggungjawab Pelindo dan siap melakukan pembiayaan 4. Pelindo bersedia memberikan pembiayaan selama kegiatan ini mendapatkan persetujuan pelaksanaan sehingga perlu adanya proses perizinan yang sah secara hukum 5. Parikesit grup sebagai pelaksana dari Pelindo untuk melakukan pengerukan di wilayah pelabuhan pelindo 6. Pelaksanaan akan dilakukan oleh desa adat 7. Perlu adanya pertemuan kesepahaman antar instansi pusat dan daerah sehingga dapat dikeluarkan nota kesepahaman antar seluruh instansi pemerintah 8. Terdapat 2 opsi izin pelaksanaan, pertama tidak perlu mengajukan KKPRL apabila kegiatan sanggup dilakukan maksimal 30 hari, kedua apabila pihak kontraktor tidak menanggapi maksimal 30 hari maka diperlukan pengajuan permohonan KKPRL	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1-3FKkXx6890m0mJRDk8-p0vaFR2M-s3M?usp=drive_link
4,4526E+13	Langsung	30/06/2026		Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan konsultasi PT Pasir Toya Anyar Kubu atas rencana permohonan konfirmasi untuk permohonan kegiatan Terminal Khusus di Karangasem Provinsi Bali	Desa Adat Pedungan	Muhammad Fadly	Andi Jaya	1. PT Pasir Toya Anyar Kubu berdiri sejak tahun 2017 dan berahat kepemilikan dan kegiatan direksi pada tahun 2019; 2. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, dan Surat Balasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan nomor B.26.500.5/1338/KL-DISKELKAN tentang Informasi Kesesuaian Tata Ruang Laut tanggal 22 Mei 2024 lokasi yang dimohonkan berada pada Zona Pemangkalian Nelayan, Zona Perikanan Tangkap Demersal dan Zona Perikanan Tangkap Pelagis dimana kegiatan kepelabuhanan yang menetap tidak diperbolehkan; 3. Informasi pemanfaatan ruang laut sekitar lokasi sebagaimana berikut: a. Kondisi existing berupa sarana tambat labuh yang berada di luar garis pantai (laut); b. Terdapat breakwater sebagai pemecah gelombang dan penahan abrasi yang berada di luar garis pantai (laut); c. Terdapat mooring dolphin berjumlah 2 buah; d. Disekitar area darat permohonan PPKPRL PT Pasir Toya Anyar Kubu terdapat gudang, mes-karyawan, tempat bongkar muat pasir; e. Terdapat aktivitas tambat labuh kapal/perahu di sekitar lokasi perairan yang dimohonkan; 4. PT Pasir Toya Anyar Kubu telah mengajukan permohonan KKPRL sejak tahun 2023, akan tetapi pada saat penilaian teknis permohonan ditolak dikembalikan dikarenakan ketidaksesuaian zona dengan kegiatan yang dimohonkan; 5. Terdapat perbedaan garis pantai berdasarkan Perda dengan aktual kondisi lapangan PT Pasir Toya Anyar Kubu; 6. Sebagian terminal khusus milik PT Pasir Toya Anyar Kubu masuk ke dalam area darat sedangkan sebagian masuk ke dalam area laut; 7. PT Pasir Toya Anyar Kubu direkomendasikan untuk memberikan inputan pada saat proses peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 terkait kegiatan yang dilakukan dan rencananya	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1tWvP3A7x6Lui1pCbSIS0fKlMmq-04k?usp=drive_link

				Permohonan Informasi	Permohonan Informasi dan Asistensi Dinas PUPR Kota Kendari atas rencana permohonan konfirmasi untuk permohonan kegiatan Reklamasi di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara		Muhammad Fadly	Andi Jaya	- Rencana kegiatan berupa reklamasi, rencana perluasan area untuk relokasi pemukiman, taman water front city, jalan dan beberapa unit rumah. - Pemohon perlu melampirkan dokumen terkait informasi pemanfaatan laut sekitar dan data kondisi terkini dilokasi sekitar - Pemohon perlu menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dibangun dari kegiatan reklamasi serta dilengkapi dengan rencana tapak site dan luas masing-masing kebutuhan area kegiatan - Pemohon Perlu menyesuaikan kembali garis pantai sesuai perda RZWPJK provinsi sulawesi tenggara - Pemohon perlu mengecek Kembali reklamasi eksisting yang sudah ada di area yang dimohonkan terkait kepemilikan lahan reklamasi tersebut, jika lahan reklamasi milik PUPR, perlu di jelaskan dalam dokumen beserta dokumentasinya. - Pemohon perlu breakdown area sesuai dengan rencana pembangunannya dan digambarkan dalam rencana tapak site - Pemohon perlu mencari solusi terkait, adanya area tambat labuh kapal pada lokasi tersebut, sebaiknya dalam rencana pembangunan dimasukkan area untuk dermaga sebagai ganti dari tambat labuh yang akan direklamasi - Pemohon perlu melampirkan Dokumen anggaran DIPA yang discan ulang dapat dilihat dengan jelas - Pemohon perlu menambahkan dokumen yang menjelaskan secara detail rencana reklamasinya, rencana pengambilan sumber material Reklamasi, rencana pemanfaatan lahan Reklamasi, gambaran umum pelaksanaan Reklamasi serta jadwal rencana pelaksanaan kerja. - Pemohon perlu menambahkan jadwal berupa table rencana kegiatan dari tahap rencana hingga pembangunan konstruksi - Pemohon Perlu melampirkan berita acara sosialisasi dengan masyarakat terkait adanya relokasi dan rencana reklamasi - Pemohon perlu Lampirkan data sekunder terkait data hidro-oceanography, profil dasar laut, dan pemanfaatan ruang laut yang ada	Selesai di Tindak Lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1QCYYpookn9gcKw5aaZ44XU90UbQILpZ7usp?drive_link
4,4526E+13	Online	30/06/2026				Dinas PUPR Kota Kendari				Maros, 06 April 2026	
		Ketua TPP								Admin Pengaduan	
		Andi Jaya S								Muhammad Fadly	

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
UNIT KERJA : BPRL PADANG
PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2026

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjuti		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	02630220240733	Whatsapp	4 Juni 2026	Permintaan Informasi	Penyampaian terkait penemuan satwa liar buaya	Iqbal Fikri	BPRL Padang	BPRL Padang	Admin merespon dengan menyampaikan bahwa saat ini BPRL Padang sudah berubah tugas dan fungsi, sehingga laporan terkait penanganan biota perairan dilindungi (buaya) dapat disampaikan ke Loka Pengelolaan Kelautan (LPK) Pekanbaru. Selanjutnya, admin mengirimkan kontak Hotline LPK Pekanbaru ke pelapor.	Selesai	Ditindaklanjuti di hari yang sama (Sesuai SOP)
2	02630220608871	Tatap Muka	9 Juni 2026	Permintaan Informasi	Asistensi Pra-Pendaftaran PKKPRIL Pondok Alaina	Arsa Cindy	BPRL Padang	BPRL Padang	Tim teknis telah mengasistensi penyusunan Dokumen KKKPRIL dengan memberi beberapa masukan berupa penambahan peta site plan	Selesai	Ditindaklanjuti di hari yang sama (Sesuai SOP)
3	02630221943276	Whatsapp	10 Juni 2026	Permintaan Informasi	Permintaan informasi terkait layanan pemanfaatan pulau kecil	Haris	BPRL Padang	BPRL Padang	Admin merespon dengan menyampaikan bahwa saat ini BPRL Padang sudah berubah tugas dan fungsi, sehingga informasi terkait pelayanan pulau-pulau kecil dapat disampaikan ke Loka Pengelolaan Kelautan (LPK) Pekanbaru atau Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selanjutnya, admin mengirimkan kontak Hotline LPK Pekanbaru dan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke pelapor.	Selesai	Ditindaklanjuti di hari yang sama (Sesuai SOP)
4	02630222429371	Whatsapp	12 Juni 2026	Permintaan Informasi	Permintaan informasi terkait laporan tahunan KKKPRIL	Deny Sim	BPRL Padang	BPRL Padang	Admin merespon dengan menyampaikan informasi terkait permohonan KKKPRIL	Selesai	Ditindaklanjuti di hari yang sama (Sesuai SOP)
5	02630222704882	Whatsapp	23 Juni 2026	Permintaan Informasi	Permintaan informasi dan asistensi terkait perizinan KKKPRIL	Alimin	BPRL Padang	BPRL Padang	Admin merespon dengan menyampaikan informasi terkait permohonan KKKPRIL	Selesai	Ditindaklanjuti di hari yang sama (Sesuai SOP)
6	02630223125972	Whatsapp	27 Juni 2026	Permintaan Informasi	Penyampaian terkait kemunculan satwa liar buaya	Kristina Mamurung	BPRL Padang	BPRL Padang	Admin merespon dengan menyampaikan bahwa saat ini BPRL Padang sudah berubah tugas dan fungsi, sehingga laporan terkait penanganan biota perairan dilindungi (buaya) dapat disampaikan ke Loka Pengelolaan Kelautan (LPK) Pekanbaru. Selanjutnya, admin mengirimkan kontak Hotline LPK Pekanbaru ke pelapor.	Selesai	Ditindaklanjuti di hari yang sama (Sesuai SOP)
7	02630223554879	Whatsapp	29 Juni 2026	Permintaan Informasi	Penyampaian terkait interaksi negatif antara satwa liar buaya dan manusia	Ahmad Baki	BPRL Padang	BPRL Padang	Admin merespon dengan menyampaikan bahwa saat ini BPRL Padang sudah berubah tugas dan fungsi, sehingga laporan terkait interaksi negatif buaya dan manusia dapat disampaikan ke Loka Pengelolaan Kelautan (LPK) Pekanbaru. Selanjutnya, admin mengirimkan kontak Hotline LPK Pekanbaru ke pelapor.	Selesai	Ditindaklanjuti di hari yang sama (Sesuai SOP)
8	02630223933812	Whatsapp	29 Juni 2026	Permintaan Informasi	Permintaan informasi terkait perizinan KKKPRIL	PT Anugerah Laut Bangka	BPRL Padang	BPRL Padang	Admin merespon dengan menyampaikan informasi terkait permohonan KKKPRIL	Selesai	Ditindaklanjuti di hari yang sama (Sesuai SOP)

Ketua TPP

Fahrur Rozi, S.H.

Padang, 30 Juni 2026
Admin Pengaduan

Azzam Rasyid, S.Si.

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjuti		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	WhatsApp	11 Juni 2026	Pengaduan berkadar pengawasan	Pada 11 Juni 2026 PT Augusta Eco Resort menyampaikan pesan WhatsApp kepada Tim Pelayanan Satpel Sorong perihal pesan yang diterimanya. Pesan tersebut mengaitkan OSS terkait permohonan KKPRL yang sedang diajukan oleh perusahaan. Pesan tersebut memuat informasi detail perusahaan, meliputi ID izin, nama perusahaan, NIB, KBLI, hingga tanggal pengajuan permohonan. Dalam pesan tersebut, pengirim meminta pembayaran senilai Rp. 5.775.900 agar permohonan KKPRL dapat dilanjutkan ke tahap verifikasi. Menindaklanjuti kejangalan, pelaku usaha kemudian melakukan konfirmasi kepada Loka PRL Sorong.	Zhia / PT Augusta Eco Resort	Gulam Arafat, S.Kel, M.I.L	Asha Novianty, S.Si	Sebagai respons atas hal tersebut, Loka PRL Sorong menyampaikan bahwa tidak ada permintaan pembayaran PNPB diluar daripada yang disampaikan melalui sistem OSS. Melalui postingan Instagram yang dikirimkan kepada pengadu, Loka PRL Sorong menghimbau agar waspada terhadap penipuan.	Tuntas	Selain menyampaikan himbauan/peringatan kepada pengaduan, tim pengaduan juga membuat himbauan secara umum lewat media sosial pada tanggal 15 Juni 2026 https://www.instagram.com/p/DZmEOmlkusW/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
2	-	WhatsApp	23 Juni 2026	Pengaduan tidak berkadar pengawasan	LPRL Sorong mendapatkan permintaan informasi terkait alokasi ruang serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut PT Buli Bangun yang berlokasi di Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Permintaan informasi ini muncul setelah adanya isu negatif yang muncul pada Laporan Harian Media Monitoring KKP Periode 22 Juni-23 Juni 2026. Isu tersebut adalah adanya desakan pengusutan pembangunan jetty PT Buli Bangun di Lalubi, Halmahera Selatan yang bersumber dari laman http://tensamulut.co/desk-apb-unit-pembangunan-jetty-nilik-pt-buli-bangun-di-lalubi	Fajar Kurniawan, S.T, M.AP, M.MG / Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Gulam Arafat, S.Kel, M.I.L	Fajar Adi Purnama, S.Pi, M.Si	LPRL Sorong menindaklanjuti dengan melakukan analisis ruang kegiatan reklamasi PT Buli Bangun, menyiapkan bahan, dan menyampaikan hasil analisis dimaksud.	Tuntas	Berdasarkan telah kesesuaian ruang menggunakan Peta Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 diperoleh informasi bahwa area Reklamasi PT Buli Bangun berada pada Zona Perikanan Tangkap (PT-03); Berdasarkan dokumen Final Materi Teknis Muatan Pesisir Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, kegiatan Reklamasi pada Zona Perikanan Tangkap diperbolehkan hanya pada kodefikasi PT-01; Berdasarkan tabel Indikasi Arahan Zonasi Dokumen Matek Tahun 2022 pada Tabel Arahan Matriks PKKPRL, Maluku Utara, kegiatan pembangunan Reklamasi pada Zona Perikanan belum diatur spesifik, namun aktivitas tidak diperbolehkan adalah mengubah atau memsuk bentuk arsitektur setempat (bisa diartikan kategori Reklamasi tidak diperbolehkan), untuk pembangunan dan pengoperasian jetty diperbolehkan.

Ketua TPP

Gulam Arafat, S.Kel, M.I.L

Sorong, 30 Juni 2026
Admin Pengaduan

Dheni Kusumarani, S.Si

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN											
UNIT KERJA: LOKA PRL SERANG											
PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2026											
No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjuti		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2,60108E+12	Whatsapp	19 Juni 2026	Permohonan Informasi	CV Inti Budidaya Bersama menanyakan apakah bisa memperbaiki unggah bukti bayar PNPB di OSS, karena foto yang dilampirkan dirasa kurang lengkap, dan tidak ada perubahan status pembayaran sejak 30 Mei 2026	Khairul anam (0851-5630-7305)	Izanatur Rahmah, S.Pi	Reno Kusuma H, S.Si	Tim LPRL Serang meneruskan informasi kendala yang dialami oleh CV Inti Budidaya Bersama kepada Tim Perizinan KKPRL, dan mengirimkan foto bukti pembayaran PNPB yang lebih lengkap	tuntas	
2	2,60108E+12	Whatsapp	24 Juni 2026	Permohonan Informasi	M Taufik pemilik KKPRL terbit untuk kegiatan budidaya koral menanyakan apakah ada peraturan terbaru mengenai titik koordinat harus berada di dekat pantai, jika iya apakah perlu revisi KKPRL	M Taufik (0852-8411-8348)	Izanatur Rahmah, S.Pi	Reno Kusuma H, S.Si	Tim LPRL Serang menjelaskan bahwa area KKPRL tergantung kebutuhan pemohon, Maka mohon untuk dipastikan seluruh kegiatan yang menetap (lebih dari 30 hari) harus berada/sesuai dengan dokumen KKPRL yang sudah terbit	tuntas	
3	2,60108E+12	Whatsapp	26 Juni 2026	Permohonan Informasi	PT Serico mengeluhkan lamanya proses penambahan KBLI pada KKPRL yang sudah terbit, kendala disampaikan karena permohonan bulan januari namun sampai 26 Mei 2026 tidak ada progres	Arifin PT Serico (081317695915)	Izanatur Rahmah, S.Pi	Dimas Rendragraha D, S.Kel	Tim LPRL Serang membantu follow up ke Tim KKPRL DJPRL Pusat mengenai keluhan dari PT Serico, beberapa kali jawaban dari Tim Pusat adalah permohonan tersebut sudah dalam proses verifikasi dokumen, sehingga diminta menunggu. 29 Juni 2026 Tim LPRL Serang melakukan pendampingan terhadap kendala ini melalui zoom. hasil pendampingan ini kemudian dilaporkan ke Tim Pusat untuk dapat ditindak lanjuti sesuai kendala dalam penambahan KBLI. tanggal 30 Juni 2026 penambahan KBLI sudah sukses sesuai konfirmasi PT Serico	tuntas	

4		Website	20 Juni 2026	Pengaduan Berkadar Pengawasan	LPRL Serang mendapatkan informasi dari website Radar Situbondo terkait pemanfaatan ruang laut berupa saluran pipa di wilayah perairan sekitar Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Pipa diduga menjadi saluran pembuangan limbah karena mengeluarkan cairan keruh yang mengarah langsung ke perairan.		Izanatur Rahmah, S.PI	Maulana Wachidul Anam	LPRL Serang telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan informasi keberadaan pipa tersebut diantaranya kepada Pangkalan PSDKP Benoa, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Pengendalian Pemanfaatan ruang laut. Selain itu LPRL Serang juga melakukan analisis spasial untuk wilayah perairan sekitar Kabupaten Situbondo guna mendapatkan informasi terkait tata ruang		https://radarbanyuwangi.jawapos.com/berita-daerah/2606200002/pipa-paralon-misterius-di-pantai-banyuglugur-resahkan-nelayan-situbondo-air-diduga-keruh https://beritanasional.id/cek-lokasi-video-viral-camat-banyuglugur-tegaskan-tidak-ada-pembuangan-limbah-ke-laut/
---	--	---------	--------------	-------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	--	--	--

